

Konsep Otonomi Daerah Dalam Pola Relasi Mandala Kedatuan Sriwijaya

Ghea Anissah Trinanda

Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

*Koresponden: gheaanissah@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

The Srivijaya Kingdom, in its historical journey, showed a strong commitment to giving more independence to the regions under its control. This meant that these regions could manage their own local matters, taking into account their unique characteristics. This idea played a vital role in boosting the economy and stability of the entire kingdom, making the "kadātuan" system a crucial part of their successful government. The principles of decentralization in Indonesia, based on these historical ideas, have been incorporated into changing laws and regulations, forming a key part of how different areas in Indonesia govern themselves. This paper aims to explore how the concept of local government or decentralization worked in the Srivijaya Kingdom's history. We use a qualitative method that helps us understand complex ideas. By comparing modern decentralization ideas with how the Srivijaya Kingdom managed its decentralization using a "mandala" structure, we see important similarities and connections between the two. The results in this paper show a historical pattern where decentralization were set up and led by a datu. This allowed powers to be shared from the central government to these decentralization regions, which were closely supervised by the central government. This reveals how the idea of decentralization has deep roots in Indonesia's history and is a critical basis for how decentralization works in the country today.

Keywords: decentralization; local government; Kadatuan Srivijaya; mandala; administrative system.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dari masa ke masa banyak mengalami perubahan sistem dimulai dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi. Perubahan sistem ini ditujukan agar mampu memperbaiki sisi pelayanan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah untuk kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah memberikan otoritas bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya. Otonomi daerah di Indonesia sudah memiliki jejak sejarah yang panjang pada masa kerajaan, di mana sistem otonomi daerah dipakai dalam birokrasi kerajaan yang mampu mengantarkan kerajaan tersebut menuju kejayaan. Konsep yang sama, tetapi dengan tujuan yang berbeda otonomi daerah didasari pada suatu wilayah yang dibagi dan terdapat pemerintahan sendiri yang di dalamnya tetap berada pada satu komando pemerintah pusat.

Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa pemberian otonomi yang meluas kepada daerah-daerah adalah strategi politik yang vital untuk mencapai stabilitas sistem. Pada saat yang sama membuka peluang bagi proses demokratisasi yang lebih kuat, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas keseluruhan dalam sistem tersebut (Lay, 2001). Tindakan memberikan otonomi yang lebih besar kepada wilayah-wilayah ini menciptakan peluang yang signifikan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Daerah-daerah yang memiliki potensi dan sumber daya alam yang melimpah dapat lebih efisien dalam mengelola sumber daya mereka sendiri, membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, dan memajukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam prosesnya, tidak hanya mendukung stabilitas sistem di tingkat lokal, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keseluruhan dalam kerangka wilayah tersebut.

Pengaturan mengenai otonomi daerah di Indonesia telah dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Di Indonesia, regulasi terkait otonomi daerah tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 yang mengenai desentralisasi teritorial atau otonomi daerah. Pasal ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayah mereka secara optimal dengan menggunakan potensi yang ada di daerah tersebut untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal. Sistem otonomi daerah yang diterapkan saat ini telah mengalami sejarah panjang dan banyak perubahan sepanjang perkembangannya, bahkan telah digunakan sejak zaman kerajaan di Indonesia, khususnya pada kerajaan tertua, yaitu Kedatuan Sriwijaya. Pada masa itu, sistem otonomi daerah digunakan dalam tatanan pemerintahan kerajaan yang mirip dengan sistem otonomi daerah yang digunakan dalam administrasi politik kerajaan pada periode tersebut.

Desentralisasi adalah suatu proses di mana kewenangan untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan fungsi-fungsi tertentu diberikan kepada organisasi-organisasi yang memiliki tingkat otonomi yang lebih tinggi dan tidak berada dalam kendali langsung kementerian pemerintah pusat (Rondinelli, 1983; Seymour, 2002). Hal tersebut mencakup pemberian wewenang kepada entitas semi otonom untuk mengatur dan mengelola sebagian dari urusan pemerintah, sebelumnya menjadi tanggung jawab eksklusif pemerintah pusat. Konsep yang digunakan oleh Pemerintahan Sriwijaya telah diterjemahkan pada sistem konteks modern yaitu melalui otonomi daerah.

Daerah otonom yang ada pada otonomi daerah masa kini, sudah ada pada masa Kedatuan Sriwijaya yang merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar yang ada di Indonesia, pemerintahan pada kerajaan ini menggunakan pembagian daerah yang

polanya sama seperti otonomi daerah yang memiliki daerah otonom, tetapi terdapat perbedaan dalam regulasi serta kebijakan implementasi pada masa kedatuan tersebut. Kedatuan Sriwijaya yang awalnya berpusat di Palembang, mengalami pertumbuhan yang signifikan selama berabad-abad, berkembang menjadi sistem politik dan ekonomi yang kompleks dan berpengaruh. telah mengalami perkembangan evolusi menjadi entitas politik serta memiliki dampak besar di wilayah kekuasaannya (Manguin, 1993).

Kedatuan Sriwijaya merupakan kerajaan yang berkembang sekitar abad VII M (682 M) yang dibuktikan pada prasasti Kedukan Bukit. Kedatuan Sriwijaya merupakan sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan berupa monarki kedatuan. Kedatuan dipimpin oleh seorang datu yang merupakan sebutan pemimpin dari bahasa melayu, kata Kedatuan sendiri disebutkan dalam beberapa prasasti peninggalan Sriwijaya yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Kota Kapur dan Prasasti Telaga Batu. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Sriwijaya, langkah yang diambil adalah untuk memperkuat aktivitas perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka. Hal ini mendorong Kedatuan Sriwijaya untuk mengadopsi sebuah strategi politik perluasan wilayah yang dikenal sebagai sistem mandala. Pendekatan ini mereka terapkan dengan tujuan untuk mengamankan jalur perdagangan yang sangat vital dan merangsang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di dalam wilayah mereka (Budisantoso, 2016).

Para datu atau kepala kadatuan dalam Sriwijaya muncul dari latar belakang budaya yang beragam, termasuk Melayu, Jawa, dan etnis-etnis lain yang mendiami wilayah kepulauan Nusantara. Meskipun mungkin memiliki latar belakang yang berbeda, datu-datulah yang memegang peran kunci dalam memelihara harmoni dan stabilitas kerajaan. Mereka bekerja sama secara sinergis, dengan setiap datu bertanggung jawab atas wilayahnya sendiri. Ini mencerminkan sebuah paradigma kerjasama yang kuat antarwilayah dalam kerajaan, di mana pluralitas budaya dan etnis bukanlah faktor pemisah, tetapi justru menjadi kekuatan yang memperkaya administrasi pemerintahan Sriwijaya

Sistem kadatuan dalam pemerintahan Sriwijaya juga mencerminkan pluralitas budaya dan keberagaman etnis yang melibatkan wilayah tersebut. Para datu berasal dari beragam latar belakang budaya dan sosial, dan mereka berkolaborasi secara harmonis untuk memelihara stabilitas kerajaan. Pemahaman ini mencerminkan gagasan kerjasama antarwilayah dan persatuan dalam beragam budaya, yang menjadi salah satu ciri khas utama dalam administrasi pemerintahan Sriwijaya. Dalam perjalanan sejarahnya, kerajaan ini mengedepankan otonomi yang lebih besar bagi wilayah-wilayah di bawah kendalinya, memungkinkan mereka untuk mengatur

urusan lokal mereka sendiri dengan mempertimbangkan keperluan khusus dan karakteristik unik masing-masing. Hal ini berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan stabilitas keseluruhan kerajaan, menjadikan sistem kadatuan sebagai elemen integral dalam tata kelola pemerintahan yang berhasil di Kedatuan Sriwijaya.

METODE

Dalam riset ini, pemilihan metode kualitatif didasarkan pada pertimbangan yang dalam. Metode kualitatif dianggap sebagai pendekatan yang sesuai untuk menggali secara mendalam konsep-konsep dan gagasan, seperti konsep otonomi daerah, dalam konteks yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, nilai, dan pandangan yang mungkin sulit diukur secara numerik atau statistik. Dalam konteks penelitian sejarah, metode kualitatif memberikan kesempatan bagi peneliti untuk secara teliti menyelidiki sumber-sumber sejarah, menafsirkan konteks sosial dan budaya pada masa lampau, serta mengkaji perubahan dalam pandangan dan pemikiran masyarakat. Ini sesuai dengan fokus penelitian yang berkaitan dengan konsep-konsep dan pemikiran terkait otonomi daerah di Indonesia melalui kedatuan Sriwijaya, di mana data-data sejarah memiliki peran penting dalam pemahaman perkembangan konsep tersebut.

Metode penelitian historis mengikuti lima tahapan, yakni pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 1995). Dalam penelitian konsepsi otonomi daerah di Indonesia melalui kedatuan Sriwijaya dengan pendekatan kualitatif, keberhasilan penelitian sangat bergantung pada ketepatan metode yang digunakan. Tahapan verifikasi kritis, termasuk kritik sejarah, evaluasi keabsahan sumber, dan penilaian relevansi sumber, penting untuk memastikan data yang dipergunakan memiliki integritas sejarah. Selanjutnya, tahap interpretasi melibatkan analisis dan sintesis data untuk mengidentifikasi makna dan pola yang muncul. Hasil analisis ini, pada akhirnya, akan diwujudkan dalam penulisan sejarah atau historiografi, yang membantu memperdalam pemahaman tentang konsepsi otonomi daerah di masa lalu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sriwijaya adalah sebuah kerajaan dengan struktur pemerintahan yang disebut sebagai kadatuan, yang berarti bahwa pemerintahan kerajaan ini terdiri dari kumpulan para datu dari suatu wilayah, serupa dengan konsep provinsi dalam sistem pemerintahan yang lebih modern (Taim, 2013). Para datu ini memiliki peran signifikan dalam mengelola tata kelola kerajaan dan menjaga ketertiban di wilayah-wilayah mereka. Mereka mengambil tanggung jawab atas administrasi lokal, pengumpulan pendapatan fiskal, serta menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah mereka. Oleh karena itu, Sriwijaya memperlihatkan model pemerintahan yang mengedepankan

peran partisipatif dan desentralisasi kekuasaan, sejalan dengan konsep wilayah provinsi dalam lingkup pemerintahan modern.

Datu maharaja pada masa Kedatuan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa yang sekaligus pendiri Kedatuan Sriwijaya, dia membuat langsung kutukan dan persumpahan dalam prasasti Telaga Batu yang ditujukan bagi para pejabat yang memangku wewenang dibawahnya agar tidak melakukan penghianatan dan pemberontakan. Di daerah-daerah yang telah ditaklukan oleh Sriwijaya ditempatkan penguasa daerah semacam gubernur provinsi yang disebut datu (Coedès & Damais, 1989). Kedatuan Sriwijaya menggunakan sistem mandala dalam mengatur birokrasi pemerintahan, yang di mana mandala-mandala tersebut daerah otonom yang berbentuk provinsi dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan datu. Datu tertinggi dalam pemerintahan yang berada pada pusat kerajaan yang disebut dengan datu maharaja.

Datu yang memimpin suatu mandala dilantik oleh Datu Sriwijaya yang merupakan pimpinan tertinggi dari kedatuan. Datu tersebut akan diberikan mandat sebagai pemimpin di wilayah mandala, untuk menjaga stabilitas di wilayah mandala agar tidak terjadi pemberontakan. Sumber tertulis yang memiliki keabsahan untuk dikaji pada masa sekarang adalah sumber prasasti, dari suatu prasasti kerajaan kita dapat mengetahui kehidupan masyarakat pada masa kerajaan, struktur birokrasi sampai dengan struktur perekonomian sehingga menjadi acuan penulisan catatan sejarah di Indonesia.

Berdasarkan data prasasti yang ditemukan, yaitu Prasasti Telaga Batu yang merupakan salah satu prasasti terlengkap yang berisi mengenai kutukan-kutukan dan persumpahan yang diberikan oleh Datu Sriwijaya, terhadap pejabat pemerintahan yang tidak taat pada perintah Datu Sriwijaya dan memuat banyak mengenai struktur birokrasi yang dimiliki Sriwijaya pada masa itu. Mampu membantu dalam merekonstruksi sejarah mengenai sistem Pemerintahan Sriwijaya. Menurut Prasasti Telaga Batu yang memiliki pertanggalan abad VII M, terdapat beberapa kalimat yang menyebutkan mengenai datu dan tugasnya pada wilayah daerah otonom yang mereka tempati, pada baris ke 20 disebutkan sebagai berikut:

“Mereka yang kunobatkan sebagai Datu, yang melindungi dan menjaga wilayah kekuasaan seperti Yuwaraja, Pratipuwara dan Rajakumara. Juga yang kunobatkan sebagai seorang Datu, jikalau kamu tidak tunduk dan taat atas kekuasaanku dan tidak menghormatiku, lalu bekerjasama dan bersekongkol dengan musuh- musuhku, kamu sendiri dan lainnya akan terbunuh kutukan” (Transkrip Prasasti Telaga Batu dalam Coedès & Damais, 1989)

Dalam prasasti Telaga Batu, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai tata nilai dan hierarki sosial dalam masyarakat pada masa itu. Salah satu poin utama adalah bahwa seorang datu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melindungi wilayah kekuasaannya, serta untuk mematuhi perintah datu maharaja yang merupakan otoritas tertinggi. Kepercayaan dalam kutukan bagi mereka yang berkhianat atau bersekutu dengan musuh menunjukkan betapa pentingnya loyalitas dalam struktur pemerintahan dan hierarki sosial pada periode tersebut. Dalam konteks ini, pesan prasasti ini secara jelas menekankan pentingnya datu memiliki loyalitas yang kuat terhadap tingkatan hierarki pada posisi datu maharaja.

Selain itu, Prasasti Telaga Batu juga memberikan wawasan tentang tingkatan sosial dan jabatan dalam masyarakat tersebut. Putra-putra datu yang dinobatkan sebagai datu, tampaknya memiliki posisi yang istimewa dalam struktur sosial. Ini mencerminkan adanya sistem keturunan atau hierarki keluarga yang kuat dalam pemerintahan dan penguasaan wilayah pada masa itu. Kesimpulannya, prasasti ini memberikan gambaran tentang bagaimana tata nilai, loyalitas, dan hierarki sosial merupakan elemen penting dalam pemerintahan dan struktur sosial pada zaman itu, sekaligus menggambarkan kompleksitas masyarakat pada masa tersebut (Kartakusuma, 1993). Dalam konteks Sriwijaya, hubungan yang kuat antara pusat pemerintahan (kedatuan) dan wilayah-wilayah di bawahnya sering disebut wilayah vasal, memiliki dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan. Politik, militer, dan budaya merupakan tiga dimensi utama dari hubungan ini (Utama, 2022).

Secara politis, wilayah-wilayah vasal harus menjaga hubungan erat dengan pusat untuk menjaga stabilitas politik, termasuk membayar upeti dan mengakui otoritas pusat. Sementara itu, dalam hal militer hubungan ini mencakup kewajiban pertahanan dan dukungan militer, menciptakan jaringan pertahanan yang kuat. Hubungan antara pusat dan wilayah-wilayah vasal di Sriwijaya membentuk dasar dari struktur pemerintahan yang kompleks dan memengaruhi berbagai aspek tata kelola kehidupan dalam kerajaan ini. Dampak hubungan yang kompleks tersebut telah berlangsung hingga berabad-abad kemudian, hal ini secara signifikan membentuk karakter serta evolusi Sriwijaya. Sistem politik, militer, dan budaya yang diwariskan melalui hubungan ini menjadi elemen yang sangat penting dalam perjalanan panjang peradaban Sriwijaya. Kontribusi penting dalam pembentukan identitas dan evolusi jangka panjang Sriwijaya sebagai peradaban yang makmur.

Struktur Tata Kelola Mandala Kedatuan Sriwijaya

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Kulke, 1993), ditemukan informasi menarik mengenai hierarki sosial yang ada dalam masyarakat Sriwijaya pada masa tersebut. Prasasti tersebut menjelaskan adanya dua kelas utama yang berkaitan

dengan status Datu. Kelas pertama merupakan suatu kelas yang terdiri dari putra-putra Datu yang memiliki tiga tingkatan yang berbeda, yaitu tingkatan pertama yang dipegang oleh Yuwaraja, yang merupakan Putra Mahkota. Tingkatan kedua dihuni oleh Pratipuwaraja, yang merupakan putra tingkat kedua, dan penting untuk dicatat bahwa Pratipuwaraja memiliki potensi untuk naik ke posisi Yuwaraja. Terakhir, pada tingkatan ketiga terdapat Rajakumara, yang merupakan putra yang berada pada tingkat ketiga dalam hierarki ini.

Namun, yang lebih menarik adalah fakta bahwa Datu tidak hanya terbatas pada keturunan putra mahkota. Prasasti tersebut juga mencatat bahwa seorang Datu dapat berasal dari individu yang bukan keturunan langsung dari raja atau putra mahkota. Individu ini mungkin merupakan penguasa atau raja dari wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan oleh Sriwijaya. Dalam konteks ini, mereka dapat diangkat menjadi seorang Datu menunjukkan fleksibilitas dalam penentuan status sosial yang tidak hanya bergantung pada garis keturunan, tetapi juga mempertimbangkan prestasi atau kedudukan penguasa dalam wilayah kekuasaan Sriwijaya. Hal ini menggambarkan kompleksitas dan dinamika sosial yang ada dalam masyarakat Sriwijaya pada masa itu, di mana hierarki sosial tidak hanya didasarkan pada keturunan, tetapi juga melibatkan faktor-faktor lain seperti keberhasilan dalam perang atau penguasaan wilayah tertentu. Prasasti ini memberikan wawasan yang berharga tentang struktur sosial dan politik dalam periode sejarah tersebut.

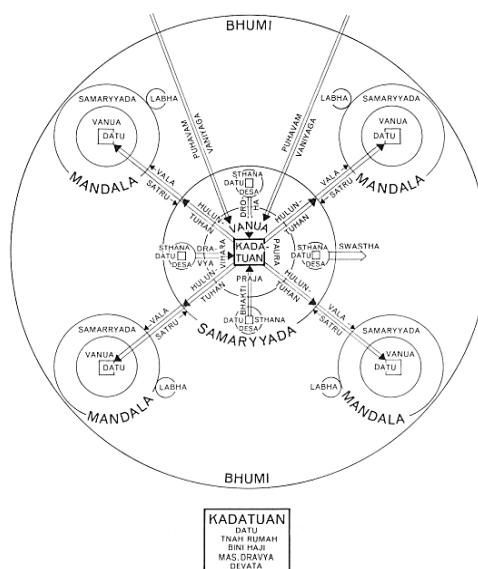
Dalam sistem mandala yang berlaku di Kedatuan Sriwijaya, terlihat adanya dua kategori utama pemegang jabatan yang terkait dengan wilayah, yaitu pusat dan daerah. Kekuasaan kedatuan ini secara terstruktur tersebar melalui wilayah otonom yang dikenal sebagai mandala. Di wilayah pusat, pemerintahan diatur oleh seorang datu maharaja yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam hierarki pemerintahan. Di sisi lain, wilayah mandala dipimpin oleh datu yang ditugaskan untuk mengelola wilayah tersebut. Selain itu, ada sejumlah jabatan dengan otoritas tertentu dalam mengatur bala tentara yang dikenal dengan sebutan parwanda.

Prasasti Telaga Batu juga menggambarkan berbagai posisi penting lainnya seperti kepala daerah (bhūpati), komandan militer (senāpati), tokoh lokal terkemuka (nāyaka), aristokrat (pratyaya), penguasa bawahan (hāji pratyaya), dan hakim (dandanayaka). Catatan ini memberikan wawasan lebih mendalam tentang struktur hierarki dan kekuasaan di masa tersebut. Dalam konteks sistem mandala yang berlaku di Kedatuan Sriwijaya, terlihat adanya dua kategori utama pemegang jabatan yang memiliki keterkaitan erat dengan wilayah, yaitu pusat dan daerah. Konsep mandala dalam konteks Sriwijaya adalah suatu sistem politik dan sosial di mana pusat kekuasaan, yang merupakan inti dari kerajaan, memengaruhi atau

mengendalikan wilayah-wilayah otonom di sekitarnya melalui berbagai bentuk hubungan, seperti aliansi, perdagangan, dan pemberian perlindungan.

Gambar 1. Model Awal Sriwijaya

Menurut Prasasti-prasasti Melayu pada Abad ke-7 Akhir



Sumber : (Kulke, 1993)

Selain lapisan jabatan yang lebih tinggi, terdapat juga lapisan jabatan yang berada pada tingkat yang lebih rendah dalam struktur pemerintahan Kedatuan Sriwijaya. Ini termasuk para pegawai kedatuan seperti ketua pekerja/buruh (*tuhā an vatak* = *vuruh*), pengawas pekerja rendah (*addhyāksi nījavarna*), ahli senjata (*vāsīkarana*), menteri, tetapi bukan golongan bangsawan (*kumārāmātya*), tentara (*cātabhata*), pejabat pengelola (*adhikarana*), karyawan toko (*kāyastha*), pengrajin (*sthāpaka*), kapten kapal (*puhāvam*), pedagang (*vaniyāga*), pelayan raja (*marsī hāji*), dan budak raja (*hulun hāji*). Prasasti Telaga Batu memberikan gambaran yang komprehensif tentang beragam jabatan yang ada dalam lingkup kedatuan, kemungkinan besar mencakup pejabat-pejabat yang mengelola wilayah ibukota kerajaan pada masa itu. Ini menunjukkan bahwa Kedatuan Sriwijaya memiliki struktur pemerintahan yang sangat terstruktur dan berhierarki, yang mencakup berbagai aspek kehidupan di dalamnya, baik yang terkait dengan administrasi pemerintahan, perdagangan, pertahanan, maupun pelayanan kepada raja.

Namun, dalam konteks sejarah Asia Tenggara, konsep mandala memahami secara sosial-politik merupakan representasi simbolis dari kekuasaan dan kerajaan berstruktur konsentris. Dalam Bahasa Sanskerta mandala diterjemahkan sebagai "lingkaran". Konsep mandala yang kemudian diterapkan dalam kerangka sosial-

politik menggambarkan pola kekuasaan yang ada di Asia Tenggara selama periode sejarah Hindu-Buddha, yang berlangsung dari abad ke-5 hingga abad ke-15. Prasasti Telaga Batu menjadi sumber berharga dalam memahami bagaimana Kedatuan Sriwijaya mengelola wilayah-wilayahnya dan mengkoordinasikan berbagai elemen penting dalam struktur pemerintahannya.

Prasasti ini menghadirkan wawasan yang mendalam tentang tatanan pemerintahan Kedatuan Sriwijaya dalam konteks konsep mandala yang diterapkan. Selain menyoroti peran pemimpin tingkat tinggi, prasasti ini menegaskan adanya beragam tingkatan jabatan yang berkolaborasi untuk mempertahankan stabilitas dan efisiensi dalam menjalankan berbagai tugas administratif, ekonomi, dan pertahanan. Hal ini menunjukkan kompleksitas struktural organisasi pemerintahan dalam kerajaan tersebut dan kesuksesan Kedatuan Sriwijaya dalam mengimplementasikan struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik pada periode tersebut, yang didasarkan konsep mandala sebagai sistem utamanya.

Selain itu, prasasti ini juga menunjukkan bahwa Kedatuan Sriwijaya mampu memanfaatkan sistem mandala yang fleksibel dan adaptif untuk mengatasi tantangan geografis dan budaya yang ada dalam wilayah mereka. Keberhasilan mereka dalam menciptakan kerja sama antara tingkatan pemerintahan yang berbeda sekaligus menjaga integritas mandala adalah bukti nyata kebijaksanaan dan keterampilan administratif luar biasa pada masa itu, masih memiliki relevansi dan nilai inspirasi dalam pemahaman modern tentang organisasi pemerintahan dan diplomasi regional.

Dinamika Distribusi Kekuasaan dalam Pola Mandala

Pada masa Kedatuan Sriwijaya, dapat diamati bahwa terjadi pembagian tugas dan distribusi kekuasaan yang sangat terorganisir. Individu-individu yang menempati posisi di pusat kerajaan memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi di seluruh wilayah kerajaan. Mereka bertanggung jawab atas koordinasi berbagai aspek pemerintahan dan memiliki peran kunci dalam menjaga integritas kerajaan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pendekatan yang sama terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab juga berlaku untuk para Datu yang berada di wilayah mandala, yang merupakan wilayah-wilayah perbatasan yang diperintah oleh Sriwijaya. Mereka tidak hanya memiliki peran dalam mengatur aspek-aspek sosial dan politik di wilayah mereka, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam mengawasi perdagangan yang terjadi di wilayah mandala mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wolters, 2011) menyoroti bahwa para Datu di wilayah mandala bukan hanya pemimpin lokal tetapi juga pemegang kendali ekonomi di daerah mereka. Tanggung jawab mereka dalam mengatur perdagangan

menunjukkan pentingnya aspek ekonomi dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan Kedatuan Sriwijaya. Dengan demikian, peran Datu tidak hanya terbatas pada dimensi politik, tetapi juga melibatkan manajemen ekonomi yang strategis. Ini mencerminkan sistem yang sangat terorganisir dan terstruktur dalam Kedatuan Sriwijaya, di mana pekerjaan dan tanggung jawab dibagikan dengan cermat di seluruh wilayah, baik di pusat kerajaan maupun di perbatasan. Hal ini membantu dalam menjaga kekuasaan dan stabilitas kerajaan, serta mempromosikan efisiensi administratif dan ekonomi di seluruh wilayah kekuasaan Sriwijaya.

Salah satu aspek yang sangat menonjol dalam Telaga Batu adalah konsep mandala, yang merupakan landasan dari sistem administrasi Sriwijaya. Dalam konsep mandala, wilayah-wilayah bawahan tidak memiliki batas fisik yang jelas sebagai penanda resmi kekuasaan. Sebaliknya, sistem ini lebih menekankan pentingnya loyalitas masyarakat dalam mandala terhadap pusat kerajaan. Konsep ini sangat relevan dengan karakteristik geografis Sriwijaya yang melibatkan banyak pulau dan wilayah pantai, sehingga penggunaan batas fisik yang kaku akan menjadi tidak efisien. Sebagai gantinya, Sriwijaya mengandalkan kerjasama, ketergantungan ekonomi, dan loyalitas memberikan suatu tanda sebagai alat untuk mempertahankan wilayah-wilayah bawahannya.

Loyalitas masyarakat terhadap pusat kerajaan Sriwijaya tercermin dalam bentuk pemberian upeti hasil bumi dan pajak dari wilayah mandala tersebut kepada pusat kerajaan. Upeti ini bukan hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pusat, tetapi juga sebagai simbol kesetiaan dan ketergantungan wilayah bawahan terhadap Sriwijaya. Prasasti-prasasti yang ditemukan di Telaga Batu mengungkapkan sejumlah informasi penting tentang sistem ini. Mereka mencatat sejumlah pemberian upeti yang diberikan oleh wilayah-wilayah mandala, seperti emas, perak, rempah-rempah, dan barang-barang berharga lainnya.

Selain itu, prasasti-prasasti ini juga mencerminkan peran yang dimainkan oleh datu, pemimpin wilayah mandala, dalam memastikan tingkat loyalitas yang tinggi di wilayah yang mereka pimpin. Mereka bertindak sebagai perantara antara pusat kerajaan dan masyarakat setempat, memastikan bahwa upeti-upeti tersebut dikumpulkan dan dikirimkan dengan tepat waktu. Pemberian upeti dari hasil bumi tersebut merupakan suatu tindakan untuk mengilustrasikan konsep kesetiaan dalam struktur mandala yang dipimpin oleh seorang datu. Pemimpin tertinggi kedatuan Datu Sriwijaya, melaksanakan tindakan tersebut dengan mengeluarkan kutukan dan persumpahan yang tertulis dalam prasasti Telaga Batu. Inti dari tindakan ini adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya pengkhianatan serta pemberontakan yang dapat muncul di dalam wilayah Kedatuan Sriwijaya.

Mengelola Loyalitas dan Batasan Kekuasaan

Prasasti yang dikeluarkan oleh Kedatuan Sriwijaya sering kali meraih perhatian para peneliti dan sejarawan dan prasasti ini dikenal dengan julukan "prasasti persumpahan." Nama ini tak lepas dari isi prasasti tersebut yang sangat menarik, yaitu kutukan yang diarahkan kepada siapa pun yang berani menantang otoritas dan kekuasaan sang raja. Dalam prasasti ini Datu Sriwijaya, menjalankan upacara persumpahan dengan mengucapkan sumpah di hadapan para dewa, termasuk dewa lokal bernama Tandrun Luah. Isi dari sumpah ini sangat tegas, yaitu bahwa siapa pun yang berani melawan raja akan mendapatkan kutukan, berarti mereka akan menghadapi nasib tragis. Kutukan ini bukanlah sekadar ancaman kosong, melainkan merupakan bagian penting dari legitimasi kekuasaan raja Sriwijaya. Baris ke-12 dalam Prasasti Telaga Batu disebutkan mengenai kutukan kepada orang-orang yang berkhianat kepada datu maharaja serta pemerintahan yang dijalani.

"Membuat persekongkolan di antara keluargamu untuk menjatuhkanku dengan upacara sihi (?) kamu akan terbunuh kutukanku. Terlebih lagi jikalau kamu akrab/intim dengan segala-sesuatu kegiatan musuh-musuhku, terutama para dukun sihir yang berusaha meracuni, menentang pemerintahanku dan tidak tunduk padaku, kamu akan terkena kutuk." (Transkrip Prasasti Telaga Batu dalam Coedès & Damais, 1989)

Selain kutukan yang menjadi sorotan utama, prasasti Sriwijaya juga menyampaikan pesan-pesan tambahan yang mencerminkan pandangan dan nilai-nilai sang raja. Salah satu pesan yang dapat diambil adalah bahwa sang raja menjamin keamanan dan stabilitas di wilayahnya selama orang-orang tetap menjaga ketertiban dan tidak menciptakan kerusuhan di dalam kerajaannya. Prasasti ini telah menjadi bukti penting dalam memahami sejarah dan budaya Kedatuan Sriwijaya. Penelitian lebih lanjut terus dilakukan untuk mengungkap lebih banyak rincian mengenai prasasti persumpahan ini, serta peran dan signifikansinya dalam konteks sejarah Indonesia (Munandar, 2017; Alnoza, 2020).

Di Kedatuan Sriwijaya, peran seorang raja tidak hanya berfungsi sebagai simbol politik dan pemerintahan, melainkan juga erat terkait dengan dimensi keagamaan. Inilah sebabnya mengapa raja dihormati secara sakral oleh penduduknya dan bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan serta kemakmuran rakyatnya. Keyakinan dalam kemampuan serta ancaman dari seorang raja dapat berdampak nyata bagi penduduknya, karena raja memiliki otoritas, pengaruh, dan status sosial yang sangat tinggi (Hamid, 2013). Ketidakadaannya kitab resmi pada periode tersebut untuk mengatur tindakan terkait pengkhianatan dan

pemberontakan, menjadikan kutukan dan persumpahan sebagai alat yang efektif untuk menjaga kestabilan sosial-politik di dalam Kedatuan Sriwijaya.

Datu Sriwijaya menggunakan kutukan dan persumpahan, secara tersirat dalam prasasti-prasasti semacam ini untuk menciptakan batasan-batasan bagi pejabat-pejabat yang memegang otoritas di lingkup kedatuan, hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya konflik dan ketidaksetiaan yang dapat mengancam stabilitas kerajaan. Datu Sriwijaya mengeluarkan prasasti-prasasti kutukan dan persumpahan (*imprecation formula*). Salah satu yang terlengkap adalah Prasasti Telaga Batu yang bentuk dan isinya sangat unik. Secara fisik batu prasasti dibentuk khusus, di bagian atas dihiasi tujuh kepala ular cobra, di bagian bawah tengah batu prasasti diberi cerat seperti yang lazim dijumpai pada yoni (De Casparis, 1956; Coedes, 2014)

Di daerah pedalaman, peran raja seringkali memegang peranan penting dalam tatanan sosial dan politik masyarakat. Dalam konteks ini, kekuasaan yang dimiliki oleh seorang raja sering kali dijelaskan melalui narasi-narasi berbaur mistis yang menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi setempat (Hall, 1976; Utama, 2022). Prasasti-prasasti yang ada memberikan bukti kuat mengenai pemahaman masyarakat terhadap kekuatan raja sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar wewenang politik atau militer. Prasasti-prasasti tersebut bukan hanya merupakan sumber sejarah yang berharga, tetapi juga mencerminkan kompleksitas peran dan persepsi raja dalam masyarakat pedalaman. Sering kali berbeda secara signifikan dengan pandangan yang dianut di wilayah perkotaan atau pusat kekuasaan yang lebih terpusat. Oleh karena itu, untuk memahami sepenuhnya dinamika kekuasaan di daerah pedalaman, diperlukan penelitian mendalam terhadap narasi-narasi mistis dalam prasasti tersebut serta bagaimana hal tersebut membentuk identitas dan otoritas raja dalam masyarakatnya.

Sistem mandala yang digunakan tidak hanya dimaksudkan untuk mengatribusikan wewenang dan mengatur perbatasan wilayah, tetapi juga mencerminkan evolusi kompleksitas suatu tatanan yang berkaitan dengan peraturan dan loyalitas terhadap Kedatuan Sriwijaya. Dalam paradigma sebelumnya, kerangka kerja ini telah menggambarkan sistem administrasi yang telah memetakan berbagai aspek batasan kekuasaan. Tujuan agar sistem yang beroperasi dapat menghasilkan efisiensi yang optimal bagi Sriwijaya. Salah satu tindakan preventif yang diambil adalah penggunaan simbol ular dalam Prasasti Telaga Batu. Simbol ular mungkin mencerminkan kekuatan dan kebijaksanaan Datu Sriwijaya serta menjadi peringatan bagi mereka yang ingin melawan pemerintahannya. Prasasti tersebut menjadi

representasi penting dari penindasan yang dijalankan oleh Sriwijaya untuk mempertahankan kekuasaannya.

Pada baris 25 disebutkan mengenai sistem yang digunakan terhadap orang-orang yang berniat jahat dan orang-orang yang berbakti. Dalam baris tersebut disebutkan mengenai orang-orang berbakti tidak akan terkena kutukan dan akan diberikan *tantra* suci sehingga terhindar dari kutukan, sebagai berikut:

“.....apalagi bila kamu berperan sebagai pelaksana kejahatan untuk menentangku, maka akan langsung tertelan dan terbunuh kutukan. Tetapi sebaliknya, bila kamu patuh, taat, dapat dipercaya dan berbakti kepadaku dan tidak berniat jahat maka aku berkahi kamu beserta anak-anakmu dan istri-istrimu dengan tantra suci yang agung sebagai imbalan jasa. Sehingga saat kutukan beraksi kamu tak akan tertelan”
(Transkrip Prasasti Telaga Batu dalam Coedès & Damais, 1989)

Dalam konteks ini, pihak-pihak yang memiliki potensi untuk memberontak terhadap Datu Sriwijaya, seperti yang disebutkan oleh (Kulke, 1993) adalah mereka yang menduduki jabatan tertentu, sebagaimana yang terdokumentasikan dalam Prasasti Telaga Batu. Ini mengindikasikan bahwa pemberontakan tidak hanya berasal dari rakyat biasa, tetapi juga bisa datang dari kalangan yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan atau masyarakat Kedatuan Sriwijaya. Hal ini menunjukkan kompleksitas politik dan upaya Datu Sriwijaya dalam mempertahankan stabilitas dan kekuasaannya. Tindakan represif dan preventif seperti yang tergambar dalam prasasti-prasasti ini merupakan bagian penting dari strategi pemerintahan Kedatuan Sriwijaya pada masa itu. Dengan demikian, pemahaman terhadap prasasti-prasasti ini memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika politik dan sosial dalam kerajaan Sriwijaya pada masa lampau.

Sistem mandala bukan hanya sekadar struktur hierarkis yang menentukan kewenangan dan wilayah, tetapi juga sebuah konsep yang mencakup tatanan normatif yang berkaitan dengan etika dan integritas dalam menjalankan administrasi dan pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek sosial dan moral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan Kedatuan Sriwijaya. Dalam perspektif ini, sistem mandala bukan hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai kerangka berpikir yang mendalam yang mencakup pemahaman mendalam terhadap budaya, sosial, dan ekonomi yang ada di wilayah-wilayah yang diperintah oleh Sriwijaya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai budaya lokal, kearifan tradisional, dan kekayaan alam menjadi penting dalam memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan efektif dan meresap dalam konteks yang beragam di dalam Kedatuan Sriwijaya.

Pandangan tentang sistem pemerintahan Kedatuan Sriwijaya yang dititikberatkan oleh Coedès dan Casparis memiliki perbedaan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Kulke. Mereka menyatakan bahwa wilayah Mandala dalam Kedatuan Sriwijaya dipimpin oleh gubernur provinsi. Namun, Kulke mempertanyakan pemakaian istilah "gubernur provinsi" dalam konteks Kedatuan Sriwijaya. Kulke (1993) berpendapat bahwa konsep "gubernur provinsi" mungkin tidak sepenuhnya relevan atau dapat digunakan untuk menggambarkan posisi pemimpin di Kedatuan Sriwijaya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan antara provinsi di suatu kerajaan modern dengan Kedatuan Sriwijaya pada masa lalu. Provinsi dalam kerajaan modern umumnya telah memiliki struktur birokrasi yang mapan dan terdefinisi dengan baik, sementara dalam Kedatuan Sriwijaya, pemimpin-pemimpin lokal lebih cenderung menjadi "datu" yang mengatur wilayah tertentu. Dalam konteks awal Kedatuan Sriwijaya, tampaknya mayoritas "datu" adalah pemimpin-pemimpin lokal yang mengatur wilayah-wilayah tertentu.

Relasi Otonomi Daerah dan Sistem Mandala Kedatuan Sriwijaya

Jika dikaitkan benang merah antara konsep otonomi daerah dalam konteks masa kini dan struktur mandala yang digunakan oleh Kedatuan Sriwijaya dalam administrasi wilayah otonom mereka, terlihat sejumlah persamaan dan relevansi yang substansial. Model mandala yang diterapkan pada masa itu melibatkan pembentukan wilayah otonom dalam bentuk mandala yang dipimpin oleh seorang datu, yang berfungsi sebagai pemimpin wilayah tersebut. Seiring perkembangan waktu, sistem birokrasi dan prinsip-prinsip mandala ini memegang peran penting dalam delegasi kekuasaan dari pusat ke wilayah otonom, memungkinkan pengawasan langsung oleh pemerintah pusat terhadap wilayah-wilayah otonom tersebut yang merupakan wilayah bawahan.

Konsep otonomi daerah, yang saat ini merupakan elemen krusial dalam struktur pemerintahan Indonesia, memiliki akar sejarah yang panjang dan signifikan dalam konteks Kedatuan Sriwijaya. Kedatuan Sriwijaya, sebagai salah satu kerajaan maritim yang mempengaruhi wilayah Nusantara di masa lalu, menjadi pelopor dalam pembentukan konsep otonomi daerah. Walaupun terdapat persamaan fundamental dalam prinsip-prinsip otonomi antara masa lalu dan masa kini, perlu dicatat bahwa perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern telah menginduksi perubahan dan pembaruan dalam kerangka otonomi daerah saat ini. Perubahan ini mencerminkan upaya adaptasi yang diperlukan untuk mengakomodasi dinamika dan perubahan yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Dalam pemahaman yang lebih luas, pengalaman Sriwijaya juga memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana pluralitas budaya dan etnis, menjadi sumber

kekuatan dalam membangun sebuah negara yang kokoh dan berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya menghargai perbedaan dan mempromosikan kerjasama antarwilayah dapat membawa manfaat besar dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran suatu negara, seperti yang telah terbukti dalam sejarah Kedatuan Sriwijaya. Dengan demikian, Sriwijaya bukan hanya menjadi pusat kekayaan budaya dan perdagangan di Asia Tenggara pada masanya, tetapi juga contoh inspiratif tentang bagaimana pluralitas dapat menjadi kekuatan dalam menjalankan pemerintahan yang kompleks dan beragam.

KESIMPULAN

Konsep Mandala menjadi bukti penting tentang kemampuan Sriwijaya dalam mengelola wilayah-wilayah bawahannya dengan efisien. Sistem administrasi yang mereka terapkan menekankan loyalitas dan ketergantungan wilayah-wilayah mandala pada pusat kekuasaan, membantu mempertahankan stabilitas dalam konteks keragaman geografis dan budaya yang kompleks. Mendorong kesimpulan bahwa Kedatuan Sriwijaya menyampaikan pelajaran yang berharga dalam kerangka tata kelola yang memiliki relevansi kontemporer, terutama dalam mengelola keragaman dalam suatu entitas negara atau wilayah yang luas. Konsep otonomi daerah telah menjadi jejak historis panjang dari Negara Indonesia dengan melihat kembali sejarah mengenai sistem mandala yang dimiliki oleh Kedatuan Sriwijaya.

Konteks konsepsi otonomi daerah mengungkapkan bahwa praktek otonomi daerah telah eksis sejak zaman kerajaan Sriwijaya. Terdapat keterkaitan yang signifikan antara konsep otonomi daerah dalam konteks masa kini dengan struktur mandala yang diterapkan oleh Kedatuan Sriwijaya dalam administrasi wilayah otonom mereka. Pada masa itu, model mandala digunakan untuk membentuk wilayah otonom yang dipimpin oleh seorang datu yang bertindak sebagai pemimpin wilayah tersebut. Sistem birokrasi dan prinsip-prinsip mandala ini, seiring berjalannya waktu, memiliki peran penting dalam delegasi kekuasaan dari pusat ke wilayah otonom, memungkinkan pemerintah pusat untuk mengawasi secara langsung wilayah-wilayah otonom yang berada di bawah kendalinya.

Dalam kerangka konsep otonomi daerah yang lebih modern, dapat ditemukan beberapa persamaan dan relevansi yang substansial dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam mandala Kedatuan Sriwijaya. Praktik otonomi daerah saat ini masih mempertahankan ide pengelompokan wilayah otonom dengan pemimpinnya, meskipun dengan bentuk dan peran yang lebih kontemporer. Hal ini mengingatkan kita pada model mandala di masa lalu, di mana kepemimpinan wilayah otonom dipegang oleh seorang datu.

Dalam praktik yang telah dijalankan dalam sistem mandala, terdapat kesamaan konsep dalam pengaturan regulasi serta hukuman bagi yang melanggar berupa kutukan. Hal tersebut juga berlaku dalam sistem otonomi daerah yang ada di Indonesia diharuskan memiliki pedoman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dalam menjalankan pemerintahan, mulai dari hal apa saja yang diatur sampai batas kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur wilayahnya. Konsep otonomi daerah memiliki jejak historis panjang dari sejarah lampau dengan sistem mandala yang berasal dari Kedatuan Sriwijaya.

Sistem birokrasi dan prinsip-prinsip mandala yang diterapkan di masa lalu juga memiliki dampak dalam konteks otonomi daerah saat ini. Delegasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke wilayah otonom masih menjadi bagian integral dari sistem ini. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara konsep otonomi daerah masa kini dan warisan praktek administratif yang telah berlangsung sejak masa kerajaan Sriwijaya. Kesamaan ini menunjukkan bahwa aspek-aspek sejarah dalam tatanan administrasi wilayah tetap memengaruhi dan relevan dalam perkembangan konsep otonomi daerah hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alnoza, M. (2020). Figur Ular Pada Prasasti Telaga Batu: Upaya Pemaknaan Berdasarkan Pendekatan Semiotika Peirce. *Berkala Arkeologi*, 40(2), 267–286. <https://doi.org/10.30883/jba.v40i2.591>
- Budisantoso, H. (2016). Sriwijaya Kerajaan Maritim Terbesar Pertama Di Nusantara. In *Jurnal Ketahanan Nasional* (Vol. 11, Issue 1, pp. 49–56).
- Coedes, G. (2014). *Kedatuan Sriwijaya*. Komunitas Bambu.
- Coedès, G. , & Damais, L.-C. (1989). *Kedatuan Sriwijaya: Penelitian Tentang Sriwijaya*. . Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- De Casparis, J. G. (1956). *The Old Malay Inscriptions of Telaga Batu (South Sumatra), Prasasti Indonesia II: Selected Inscriptions from the to the century A.D.* Masa Baru.
- Eka Asih Putrina Taim. (2013). Studi Kewilayahan Dalam Penelitian Peradaban Śriwijaya. *Kalpataru, Majalah Arkeologi*, 22.
- Hall, K. R. (1976). *State and Statecraft in Early Sriwijaya*. In K. R. Hall & J. K. Whitmore (Eds.), *Explorations in Early Southeast Asian History: The Origins of Southeast Asian Statecraft*. University of Michigan Press, University of Michigan Center for Southeast Asian Studies.
- Hamid, A. R. (2013). *Sejarah Maritim Indonesia*. Penerbit Ombak.

- Kartakusuma, R. (1993). Dapunta Hiyam Sri Jayanasa: Kajian Atas Makna Dari Prasasti Telaga Batu. *Amerta Berkala Arkeologi*.
- Kulke, H. (1993). "Kadātuan Śrīvijaya" - Empire or kraton of Śrīvijaya? A Reassessment of the Epigraphical Evidence. *Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient*, 80(1), 159-180. <https://doi.org/10.3406/befeo.1993.2193>
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang.
- Lay, C. (2001). Otonomi Daerah dan Keindonesiaan. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 5, Issue 2, pp. 139-162).
- Munandar, A. Aris. (2017). Jejak Masa Silam: Pesan-pesan Prasasti Sriwijaya. In *Kaladesa: Awal Sejarah Nusantara*. . Wedatama Widya Sastra.
- Manguin, P.-Y. (1993). *Palembang And Sriwijaya: An Early Malay Harbour-City Rediscovered Source: Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Vol . 66, No. 1 (264) Published by: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Soc. 66(1), 23-46*. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/41486188>
- Rondinelli, D., & C. G. (1983). Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. *SAGE Publications*.
- Seymour, R., & T. S. (2002). Otonomi daerah: Indonesia's decentralisation experiment. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 33-51.
- Utama, N. J. (2022). Hegemoni Maritim dan Militer Kerajaan Sriwijaya di Kawasan Asia Tenggara Abad 7-10 M. *Yupa: Historical Studies Journal*, 5(2), 78-90. <https://doi.org/10.30872/yupa.v5i2.936>
- Wolters, O. W. (2011). *Kemaharajaan Maritim Sriwijaya & Perniagaan Dunia Abad ke-III-Abad VII*. Komunitas Bambu.